

Kolaborasi Strategis Antara Lembaga Pendidikan Dan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Junaedi
Akademi Bisnis Lombok

Abstrak Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, mekanisme, serta dampak sinergi antara kedua institusi tersebut terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah berperan sebagai pengarah, fasilitator, dan penyedia dukungan kebijakan serta sumber daya, sedangkan lembaga pendidikan berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan SDM, inovasi, dan kewirausahaan berbasis lokal. Peran pemerintah daerah paling dominan sebagai fasilitator kebijakan (25%), menunjukkan bahwa arah dan keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang visioner dan terintegrasi. Dukungan terhadap kurikulum vokasi (22%) serta penyediaan dana dan sarana (20%) memperlihatkan adanya komitmen terhadap peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, peran sebagai penghubung dunia usaha (18%) dan pembina UMKM (15%) masih perlu diperkuat agar sinergi antar sektor semakin optimal. Di sisi lain, lembaga pendidikan berperan besar dalam aspek pengembangan SDM lokal (30%) dan riset serta inovasi terapan (25%), yang menjadi motor utama penguatan ekonomi berbasis pengetahuan. Melalui kegiatan inkubasi bisnis (18%), lembaga pendidikan juga turut mencetak wirausahawan muda yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha (15%) serta pemberdayaan masyarakat (12%) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah melangkah lebih jauh dari fungsi akademik tradisional menuju peran sosial-ekonomi yang strategis. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan membentuk ekosistem pendidikan ekonomi lokal yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Pemerintah berperan menciptakan kebijakan kondusif dan infrastruktur pendukung, sementara lembaga pendidikan menjadi agen transformasi pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, mandiri, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Lokal, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan,

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan pilar utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks dalam meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah kolaborasi yang efektif antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah (Muzaki, 2025).

Lembaga pendidikan, baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, maupun Universitas, merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. Sementara itu, pemerintah daerah berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pengelola sumber daya masyarakat, dan penggerak berbagai program pembangunan ekonomi. Kolaborasi strategis antara kedua pihak ini krusial karena dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan dengan kebutuhan riil tenaga kerja dan perekonomian daerah. Ketika lembaga pendidikan dan pemerintah daerah memiliki visi dan arah yang selaras, terciptalah sinergi yang dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat (Hasan, 2024).

Banyak daerah di Indonesia menghadapi ketidaksesuaian antara capaian pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak terserap pasar kerja karena kompetensi mereka tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor ekonomi lokal.

Hal ini menyebabkan meningkatnya kemiskinan terdidik dan rendahnya produktivitas tenaga kerja lokal. Di sisi lain, pelaku usaha lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seringkali kekurangan tenaga kerja terampil dan inovatif yang mampu mengembangkan produk dan layanan yang kompetitif. Situasi ini menyoroti perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara sistem pendidikan dan arah pembangunan ekonomi daerah (Supriyadi & Sholahuddin, 2024).

Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong perekonomian daerah, seperti pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Namun, keberhasilan program-program ini seringkali terhambat oleh terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya penelitian terapan, dan kurangnya inovasi berbasis teknologi. Hal ini menyoroti pentingnya lembaga pendidikan sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Melalui kolaborasi, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dalam menyediakan tenaga kerja terampil, melakukan penelitian terapan untuk pengembangan industri lokal, dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan nyata (Wahyudiono, 2024).

Konsep kolaborasi strategis antara pendidikan dan pemerintah melampaui kerja sama administratif dan mencakup perencanaan jangka panjang yang terarah. Strategi kolaborasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti pengembangan kurikulum berbasis permintaan, pembentukan program magang dan pelatihan kerja lokal, pendirian pusat inovasi dan inkubator bisnis, serta pelaksanaan penelitian terapan yang hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha. Melalui mekanisme ini, lembaga pendidikan dapat berfungsi sebagai pusat keunggulan yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Hakim & Lubis, 2023).

Para sarajana jarang melakukan penelitian tentang kolaborasi antara Pendidikan dengan pemerintah seperti pada penelitian seperti pada penelitian Rahmawati et al., (2025) fokus pada Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Penelitian Siwitomo et al., (2023) Kolaborasi Pendidikan Strategi Dan Inovasi. Nasila & Napu, (2024) Strategi Baru dalam Mendukung Kewirausahaan Sosial untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Marginal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sehingga penelitian ini mengisi gap pengetahuan yang berfokus pada kolaborasi strategis antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bentuk, proses, dan strategi kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Erlanda & Ilman, 2024). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan informan kunci dan analisis dokumen kebijakan serta praktik kolaborasi yang terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan fenomena secara holistik, menginterpretasi pengalaman para kolaborator, dan menginterpretasi dampaknya terhadap perekonomian daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

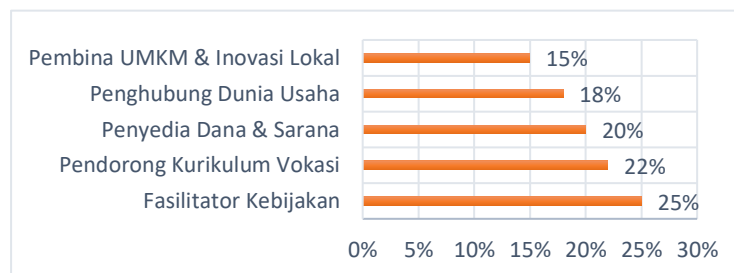
Sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan (Fadila, 2025). Melalui kolaborasi

ini, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah. Pemerintah daerah, di sisi lain, memainkan peran penting sebagai pengarah kebijakan, penyedia fasilitas, dan jembatan antara dunia pendidikan dengan sektor industri serta masyarakat (Wiarttha et al., 2025).

Bentuk dan Pola Kolaborasi antara Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah

Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah merupakan pilar penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan di tingkat lokal. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal melalui kebijakan dan program, tetapi juga mencerminkan proses interaksi dinamis antara dunia pendidikan, birokrasi, dan masyarakat. Melalui kerja sama strategis ini, pemerintah daerah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penyedia dukungan sumber daya, sedangkan lembaga pendidikan bertindak sebagai pusat inovasi, riset terapan, dan penghasil sumber daya manusia yang kompeten (Indah et al., 2025).

Bentuk dan pola kerja sama ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan kolaboratif yang partisipatif. Pendidikan tidak lagi berdiri sebagai entitas terpisah dari sistem ekonomi daerah, tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap bentuk dan pola kolaborasi ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana sinergi tersebut dapat menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan (Asnuryati, 2023).



Gambar 1. Kolaborasi antara Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah

Sumber: diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan gambar 1 diatas peran Pemerintah Daerah dalam mendukung ekosistem pendidikan ekonomi lokal, terlihat bahwa pemerintah memiliki lima peran utama dengan proporsi kontribusi yang beragam. Peran sebagai fasilitator kebijakan menempati posisi tertinggi dengan kontribusi sebesar 25%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan dominan dalam menciptakan arah kebijakan dan regulasi yang mendukung sinergi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berfungsi sebagai landasan bagi terbentuknya program kolaboratif, seperti pengembangan kurikulum vokasi berbasis potensi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi teknologi tepat guna. Peran ini menegaskan posisi pemerintah sebagai pengarah utama pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan sumber daya manusia.

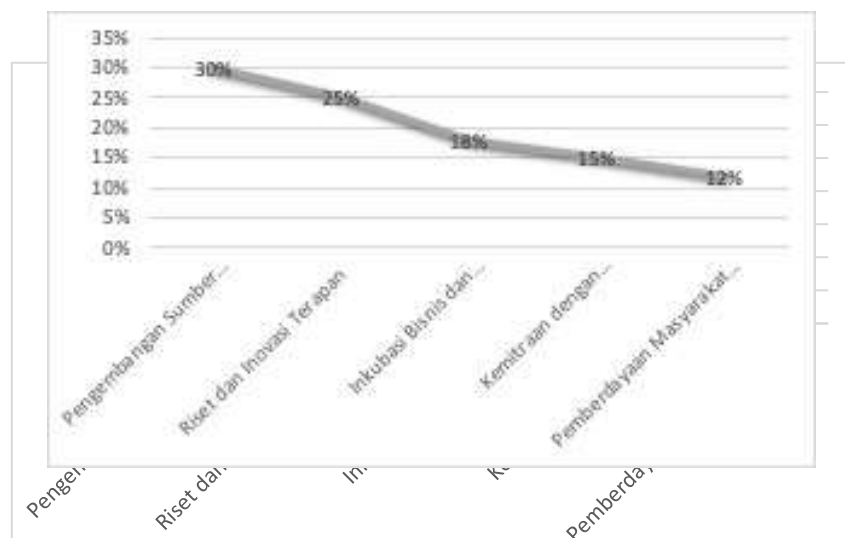
Peran pemerintah sebagai pendorong kurikulum vokasi memiliki kontribusi sebesar 22%, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lokal. Melalui sinergi dengan lembaga pendidikan, pemerintah berupaya menciptakan kurikulum yang relevan dengan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata. Upaya ini menjadi bagian penting dari kebijakan link and match yang bertujuan meningkatkan kualitas dan keterserapan lulusan di dunia kerja. Di sisi lain, peran penyedia dana dan sarana menempati porsi 20%, yang

mencerminkan kontribusi nyata pemerintah dalam mendukung aspek operasional kolaborasi, seperti penyediaan fasilitas pelatihan, bantuan riset, dan pembangunan pusat pelatihan kerja daerah. Dukungan ini menjadi elemen penting agar kerja sama antara pendidikan dan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, peran pemerintah sebagai penghubung dunia usaha menyumbang 18%, yang menunjukkan fungsi pemerintah sebagai mediator antara lembaga pendidikan dan sektor industri. Melalui kegiatan forum bisnis, kemitraan pelatihan, dan program magang industri, pemerintah berusaha menjembatani lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, porsi yang relatif lebih kecil ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam memperkuat jejaring komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Adapun peran sebagai pembina UMKM dan inovasi lokal memperoleh kontribusi 15%, menandakan bahwa meskipun penting, dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan inovasi masyarakat masih perlu diperluas. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan perlu memperkuat pelatihan kewirausahaan, digitalisasi bisnis, serta pengembangan produk unggulan lokal agar dampak ekonomi dari kolaborasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kontribusi Lembaga Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi lokal. Dalam era transformasi ekonomi yang semakin kompetitif, pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga pendidikan berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas daerah. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam pembangunan ekonomi lokal tercermin dari berbagai program yang mengintegrasikan teori akademik dengan praktik ekonomi riil. Pendidikan vokasi, riset terapan, pelatihan kewirausahaan, serta kemitraan dengan dunia industri dan pemerintah daerah merupakan bentuk konkret dari kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang mampu meningkatkan daya saing produk dan jasa daerah. Selain itu, lembaga pendidikan juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui program-program nonformal yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan literasi ekonomi. Kegiatan seperti pelatihan digital marketing, pengembangan UMKM, serta pendampingan usaha berbasis potensi lokal menjadi bukti bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.



Sumber: diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memainkan peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui berbagai bentuk kontribusi yang terukur. Aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal menempati posisi tertinggi dengan kontribusi sebesar 30%, menandakan bahwa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta potensi ekonomi daerah. Keberhasilan ini tampak pada meningkatnya relevansi kurikulum vokasi dengan sektor-sektor unggulan seperti pertanian modern, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, yang menjadi tulang punggung pembangunan lokal. Kontribusi berikutnya berasal dari riset dan inovasi terapan sebesar 25%, yang menggambarkan peran lembaga pendidikan dalam menghadirkan solusi konkret terhadap permasalahan ekonomi masyarakat. Inovasi yang lahir dari kampus dan sekolah vokasi tidak lagi berhenti pada tataran akademik, melainkan langsung dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan industri lokal. Penerapan teknologi tepat guna, inovasi produk berbasis potensi daerah, serta efisiensi proses produksi menjadi contoh nyata sinergi antara riset pendidikan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Aspek inkubasi bisnis dan kewirausahaan mahasiswa menyumbang 18%, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan kini bertransformasi menjadi inkubator ekonomi baru. Mahasiswa dan alumni tidak hanya diarahkan untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja melalui program start-up lokal, pelatihan kewirausahaan, dan akses modal usaha. Pola ini berkontribusi positif dalam mendorong munculnya pelaku ekonomi muda yang berdaya saing tinggi di tingkat daerah. Sementara itu, kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha menyumbang 15%, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem pendidikan ekonomi lokal. Program seperti magang industri, penelitian bersama, dan pengabdian masyarakat berbasis ekonomi produktif menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja. Dukungan pemerintah daerah melalui regulasi dan fasilitas juga memperkuat posisi lembaga pendidikan sebagai aktor pembangunan ekonomi.

Terakhir, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal memiliki kontribusi 12%, yang meskipun relatif kecil, memiliki dampak sosial yang signifikan. Pelatihan digital marketing, literasi keuangan, dan pertanian modern yang dilakukan oleh lembaga pendidikan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi produktif. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya berperan sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah. Melalui kombinasi antara pengembangan SDM, inovasi riset, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat, lembaga pendidikan telah menjadi bagian integral dari ekosistem pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dan lembaga pendidikan memiliki hubungan simbiotik dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah berperan sebagai pengarah, fasilitator, dan penyedia dukungan kebijakan serta sumber daya, sedangkan lembaga pendidikan berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan SDM, inovasi, dan kewirausahaan berbasis lokal. Peran pemerintah daerah paling dominan sebagai fasilitator kebijakan (25%), menunjukkan bahwa arah dan keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang visioner dan terintegrasi. Dukungan terhadap kurikulum vokasi (22%) serta penyediaan dana dan sarana (20%) memperlihatkan adanya komitmen terhadap peningkatan relevansi

pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, peran sebagai penghubung dunia usaha (18%) dan pembina UMKM (15%) masih perlu diperkuat agar sinergi antar sektor semakin optimal. Di sisi lain, lembaga pendidikan berperan besar dalam aspek pengembangan SDM lokal (30%) dan riset serta inovasi terapan (25%), yang menjadi motor utama penguatan ekonomi berbasis pengetahuan. Melalui kegiatan inkubasi bisnis (18%), lembaga pendidikan juga turut mencetak wirausahawan muda yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha (15%) serta pemberdayaan masyarakat (12%) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah melangkah lebih jauh dari fungsi akademik tradisional menuju peran sosial-ekonomi yang strategis. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan membentuk ekosistem pendidikan ekonomi lokal yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Pemerintah berperan menciptakan kebijakan kondusif dan infrastruktur pendukung, sementara lembaga pendidikan menjadi agen transformasi pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, mandiri, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hasan. (2024). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Pesantren Melalui Kolaborasi Kementerian Agama Dan Dinas Pendidikan Dayah. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(4), 356–380. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v2i4.124>
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal Asnuryati. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2175–2183.
- Fadila, N. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501>
- Hakim, A., & Lubis, M. (2023). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Keuangan Mendukung UMKM Naik Kelas di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 866–881. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20914/7065>
- Indah, C. L., Alfarizy, R., & Wahjono, S. I. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 5, 130–136.
- Mohammad Muzaki, B. A. (2025). Pendidikan Berbasis Kewirausahaan sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Lokal: Sebuah Kajian Pustaka. 1(2), 157–170.
- Nasila, R., & Napu, I. A. (2024). Strategi Baru dalam Mendukung Kewirausahaan Sosial untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Marginal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. *Journal of Education Research*, 5(4), 4853–4867. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1671>
- Rahmawati, Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4(April), 422–431. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/358>
- Siwitomo, D. P. A., Fitriyani, N. N., & ... (2023). Kolaborasi Pendidikan Strategi Dan Inovasi. *Prosiding Seminar ...*, 1(1), 64–68. <https://jurnal.fkip.unismuh.ac.id/index.php/prosidingunimbone/article/view/1456%0Ahttps://jurnal.fkip.unismuh.ac.id/index.php/prosidingunimbone/article/download/1456/411>
- Supriyadi, & Sholahuddin, M. A. (2024). *PROSIDING SIMPOSIUM RISET EKONOMI (SIMREK) VIII 2024 eISSN: xxxxx Prosiding Simposium Riset Ekonomi (SIMREK) VIII*

Tahun 2024, Volume 1 | 6. 1, 6–11.

- Wahyudiono, A. (2024). Peran Program Banyuwangi Mengajar Dalam Mengurangi Ketimpangan Akses Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah. *Katarsis*, 1(3), 58–68. <https://doi.org/10.62734/kts.v1i3.284>
- Wiartha, N. G. M., Diwyarthi, N. D. M. S. D., Adnyana, I. M. S., Jata, I. W., Darmiati, M., & Pratama, I. W. A. (2025). Kolaborasi Pentahelix di Desa Wisata Keliki Gianyar dalam Mendukung Pengembangan Wisata Budaya Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 42–48. https://doi.org/10.47767/sehati_abdimas.v7i1.903
- Yola Erlanda, & Ilman, G. M. (2024). Otimalisasi Potensi Ekonomi Lokal: Strategi Penguatan Dan Implikasi Positif Peran Umkm Kelurahan Made Kota Surabaya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 179–188. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1183>